

# Ayo Berantas Korupsi

"BERANI jujur itu hebat, merupakan semboyan yang diusung Indonesia dalam memperingati hari antikorupsi sedunia. Semboyan ini pada dasarnya merupakan ajakan moral bagi masyarakat Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama."

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

RASA hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, begitulah kiasan yang bisa diungkapkan melihat fenomena korupsi yang terjadi dalam kehidupan birokrasi di Indonesia. Keinginan untuk bersih-bersih birokrasi dari korupsi sungguh sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya hobi melakukan korupsi di kalangan birokrat tidak juga berhenti dan semakin hari semakin menjadi-jadi saja. Oleh karena itu, tidak bisalah dipungkiri lagi kalau birokrasi di Indonesia sangat identik dengan korupsi.

Secara umum dapatlah dipahami, bahwa birokrasi di Indonesia sebenarnya ialah menganut sistem trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Di mana pemerintahan itu sendiri pada dasarnya tersusun atas dua elemen penting, yaitu birokrat pegawai negeri dan birokrat bukan pegawai negeri.

Undang-Undang 43 Tahun 1999 memaparkan bahwa pegawai negeri itu adalah orang-orang yang berkerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan birokrat bukan pegawai negeri ialah orang-orang yang men-

empati posisi sebagai presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota MA (Mahkamah Agung); ketua, wakil ketua, dan anggota DPA/Wantimpres (Dewan Pertimbangan Agung/Dewan Pertimbangan Presiden); ketua, wakil ketua, dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri yang berkedudukan sebagai dubes luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan undang-undang yang ada, birokrat (baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri) sebenarnya merupakan unsur aparatur negara

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, dalam fungsinya sebagai penyelenggara tugas pemerintahan.

Di era sekarang ini, birokrat sebagai ujung tombak pelaksana kehidupan bernegara terasa sungguh sangat tercorengi. Kejadian beramai-ramainya birokrat (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) terbelenggu dalam tindak pidana korupsi, menandakan bahwa pelaksanaan birokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Para birokrat mulai dari daerah sampai ibu kota, terindikasi terjebak dalam indahnya buaian korupsi.

Birokrat yang diharapkan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, malah sebaliknya lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum. Sikap pragmatis para birokrat ini, sudah barang tentu pada akhirnya menimbulkan kesulitan pembangunan

dan membuat kualitas pelayanan dari pemerintahan terpuruk.

Pengelolaan birokrasi yang tidak transparan merupakan faktor utama penyebab para birokrat terilit tindak korupsi. Proyek-proyek yang melibatkan kepentingan pribadi, diupayakan dikelola melalui lingkungan kerja yang tertutup guna untuk dapat diakali.

Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlangsung dalam kehidupan birokrasi di Indonesia, maka cara satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan memberikan tindakan keras dan tegas terhadap para birokrat yang melakukan korupsi. Di samping juga, pengawasan yang mengikat dan berlapis harus terus dapat ditingkatkan demi menjaga terselenggarakannya pemerintahan yang bersih. Sehingga pada akhirnya, cita-cita untuk melahirkan kehidupan birokrasi Indonesia yang amanah dapat terwujud dengan baik. (\*\*)





# Membangun Kota Pelajar

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

**KOTA** pelajar adalah kotanya para pelajar. Sebuah kota dengan berbasis pendidikan, yang menggambarkan tingkat keterpelajaran penduduknya yang tinggi. Di mana masyarakat di sana memahami, bahwa penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap pendidikan merupakan dasar penting bagi mereka untuk merespon situasi lokal, nasional, regional, dan global yang

**KOTA** pelajar adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan dengan bertumpu pada wawasan yang berasal dari teori-teori pendidikan. Sebuah kota yang memiliki suasana dinamis dan hubungan harmonis dengan dunia pendidikan. Kota yang dapat menumbuhkan berkembang terjadinya proses interaksi belajar-mengajar yang maksimal bagi masyarakatnya. Kota

yang memahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan penduduknya, demi peranannya nanti dalam lingkup pergaulan bermasyarakat. Kota yang mencerminkan bahwa pendidikan itu merupakan satu-satunya cara untuk memanusiakan manusia, atau dengan kata lain adalah upaya utama untuk membangun manusia seutuhnya.

Untuk menciptakan sebuah kota menjadi kota pelajar, adalah bukan suatu hal yang mudah. Adanya komitmen yang kuat dan rasa optimis yang tinggi dari semua pihak, ialah faktor penting untuk membangun suatu kota menjadi kota pelajar. Sarana-prasarana yang bermutu dan tenaga pendidik yang unggul, merupakan dua hal pokok yang harus tersedia demi berdirinya sebuah kota pelajar.

Menurut Sudarwan (2010) sarana-prasarana yang harus ada guna menjamin keberadaan suatu kota pelajar, antara lain:

a) Tersedianya jenis dan jenjang pendidikan dengan beragam keahlian atau disiplin ilmu yang tidak hanya kompetitif, akan tetapi juga relatif sama dengan yang ditawarkan oleh tempat lain.

b) Tersedianya mutu proses dan iuran pendidikan yang secara nisbi setara dengan mutu sejenis yang

dicapai di tempat lain.

c) Tersedianya sumber daya internal dan eksternal pendidikan yang memenuhi kriteria jumlah dan kualitas.

d) Tersedianya pusat penjualan buku yang lengkap dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

e) Adanya pusat-pusat informasi yang lengkap, edukatif, dan representatif.

f) Tersedianya lingkungan belajar yang kondusif.

g) Adanya kondisi politik dan ekonomi masyarakat yang baik.

h) Tersedianya jaringan informasi yang bagus.

i) Adanya pemondokan dan biaya hidup yang relatif terjangkau.

j) Tersedianya sarana transportasi yang baik dan terjangkau.

k) Adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk kepentingan pendidikan.

l) Adanya pengakuan yang baik dari berbagai pihak atas hasil dan mutu pendidikan.

Sedangkan dari aspek tenaga pendidik, untuk menciptakan suatu kota pelajar yang bermutu. Sudarwan (2010) berpandangan, bahwa pendidik haruslah memiliki kompetensi, berupa:

a) Kompetensi pedagogik (mampu memahami peserta didik secara mendalam; mampu merancang

pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; mampu melaksanakan pembelajaran; mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya).

b) Kompetensi kepribadian (memiliki kepribadian yang mantap dan stabil; memiliki kepribadian yang arif; memiliki kepribadian yang berwibawa; dan memiliki akhlak yang mulia dan dapat dijadikan teladan).

c) Kompetensi sosial (mampu berkomunikasi dan bergaul secara arif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar; dan yang paling penting, harus juga memiliki kemampuan dalam menguasai struktur dan metode keilmuan).

Melalui keberadaan sarana-prasarana dan tenaga pendidik yang baik dan bermutu, diharapkan nantinya terciptalah suatu kota pelajar yang unggul. Guna untuk menghasilkan paradigma masyarakat yang cerdas, benar, jujur, dan amanah yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. (\*\*)

**DARI KECIL SUDAH TERBIASA TERIMA SUAP YA....**

